**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR**

Iwaldus Pebri Mari

I Anwar Made

Doni Wirshandono

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan pada Kabupaten Manggarai Barat 2) Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pada Kabupaten Manggarai Barat 3) Untuk mengetahui rasio keserasian pada Kabupaten Manggarai Barat dan 4) Untuk mengetahui rasio pertumbuhan keuangan pada Kabupaten Manggarai Barat.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat studi kasus, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka yang dikumpulkan kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan jalan membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya dan dengan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan data angka. Dalam hal ini, yaitu mengenai keuangan di Kabupaten Manggarai Barat. Adapun untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Manggarai Barat yang meliputi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivitas.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis mengenai kinerjakeuangan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012 sampai 2015, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 sampai 2015 adalah rata-rata sebesar 7,58% yang masuk dalam kategori rendah sekali. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas pada Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 sampai 2015 menunjukkan adanya kecenderungan mengalami peningkatan. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 sampai 2015 dapat dikategorikan efektif sedangkan pada tahun 2012 belum mampu mencapai afektivitas, hal tersebut dikarenakan rata-rata rasio yang telah dicapai adalah 112,40% lebih dari 1 (satu) atau 100% . Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2015 menunjukkan adanya rasio pertumbuhan yang berfluktuasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan atas pencapain pertumbuhan atas pendapatan asli daerah setiap periodenya menunjukkan adanya pertumbuhan yang mengalami penurunan pada tahun 2015.

***Kata Kunci: Tingkat Kemandirian Keuangan, Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan Keuangan.***

# **PENDAHULUAN**

Rasio keuangan yang dihitung dan diinterpretasikan secara tepat akan dapat menunjukkan aspek-aspek mana yang perlu dievaluasi dan dianalisa lebih lanjut. Rasio keuangan yang dihitung dan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus dikaitkan dengan tujuan utama yang hendak dicapai. Melalui penilaian dari analisa rasio keuangan maka pihak yang berkepentingan dapat memahami makna yang terkandung dalam laporan keuangan. Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan perusahaan, sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan atau instansi yang bersangkutan, demikian pula halnya pada instansi suatu pemerintah daerah. Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah pada masa yang akan datang, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih atas pelaksanaan anggaran daerah. Selanjutnya melalui pengukuran atas kinerja keuangan daerah dengan sendirinya dapat digunakan sebagai alat bagi masyarakat untuk mengawasi atas pelaksanaan dan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijaksanaan anggaran daerah (Halim, 2002).

Penilaian kinerja keuangan daerah bertujuan untuk memotivasi pegawai, dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik atau ekstrinsik. Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Selajutnya terkait dengan pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan atas kinerja keuangan yang telah terjadi. Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data keuangan yang dimiliki dan bersumber pada APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi serta *debt service coverage ratio* (Halim, 2002).

Hasil penelitian Widodo (2001) yang melakukan analisis terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah yang diperoleh yaitu kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menyelesanggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih relatif dan bahkan cenderung mengalami penurunan yaitu dari 16,65% pada tahun anggaran 1997/1998 menjadi 9,69% pada tahun anggaran 2000. Pendapatan daerah diproritaskan untuk mencukupi belanja rutin yaitu mencapai rata-rata sebesar 80% dari total pendapatan yang diterima. Aktivitas penyerapan dana yaitu sebesar 72,96% dari total anggaran pembangunan dan secara potensial apabila terjadi kekurangan dana dapat melakukan pinjaman dana dengan maksimum pokok angsuran sebesar Rp. 15,055 miliar.

# **TINJAUAN PUSTAKA**

Hasil penelitian Yanti (2006), dengan judul penelitian yaitu analisis laporan arus kas untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui analisis laporan arus kas untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2004 kurang bagus jika dibandingkan dengan tahun 2003. Kenaikan kas bersih dari seluruh aktivitas mengalami penurunan pada tahun 2004. Dari analisis tingkat kecukupan modal dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat dikatakan cukup bagus dengan tingkat efisiensi dapat diberikan penilaian kurang bagus. Berdasarkan hasil analisis efisiensi hasil pengembalian arus kas atas aktiva menunjukkan kinerja yang kurang bagus dan hasil analisis tingkat likuiditas dapat diketahui adanya peningkatan setiap tahunnya.

Organisasi sektor publik pada saat ini telah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan efisiensi biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atau aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang mengurusi dan mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sekarang sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang dibutuhkan dan substansial keberadaannya. Menurut Mardiasmo (2002:32) istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Definisi lain mengenai Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:121) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” adalah : “Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.“

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem pengukuran kinerja merupakan hasil kerja operasional suatu organisasi yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan yang juga dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kinerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat.

Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu aktivitas baru. Setiap departemen, suatu kerja dan unit pelaksanaan tugas telah diprogram untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Menurut Mardiasmo (2001:121) “Pengukuran kinerja sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial”.

 Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penilaian kinerja lebih ditekankan pada bagaimana karyawan sebagai bagian dari organisasi dapat mengerjakan sesuatu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU no 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran. Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada era orde baru (Mamesah dalam Halim, 1995:20). Pengertian APBD pada masa orde lama adalah perencanaan pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (Kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup tadi (Wajong dalam Halim, 2007:20). Berdasarkan peraturan perundangan no.17 tahun 2000 tentang pinjaman daerah, APBD dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.

# **METODE**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengolahan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat studi kasus, menurut Indriantoro dan Supomo (2002: 146), yaitu jenis penelitian yang berisikan paparan atau data yang relevan dari hasil penelitian pada obyek penelitian yang mencoba mengetahui dan memecahkan permasalahan yang dihadapi instansi. Sedangkan prosedur pemecahan masalah pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka yang dikumpulkan kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan jalan membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya dan dengan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan data angka. Dalam hal ini, yaitu mengenai keuangan di Kabupaten Manggarai Barat

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, menurut Indriantoro dan Supomo (2002:147) yaitu: “Data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara”, dalam hal ini yaitu data laporan keuangan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012 sampai 2015. Untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data sekunder maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Langkah ini berupa kegiatan mengumpulkan data- data sekunder dengan cara melihat atau menyalin catatan kertas kerja yang dianggap berhubungan dengan penelitian yang meliputi laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Manggarai Barat

# **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis data mengenai kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Manggarai Barat yaitu meliputi tingkat kemandirian keuangan, efektivitas dan efisiensi, rasio keserasian dan pertumbuhan keuangan maka pembahasan masing-masing kinerja keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

* + 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 sampai 2015 adalah rata-rata sebesar 7,58% yang masuk dalam kategori rendah sekali. Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233).

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan keuangan pada kota Medan dalam membiayai sendiri kegiatan kepemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dapat juga diartikanbahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakatdalam pembangunan daerah, yaitu dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama PAD.

Berdasarkan pertumbuhan kemandirian keuangan daerah yang masuk dalam kategori rendah sekali, terlihat pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum menunjukan upaya mengurangi ketergantungannta terhadap pantuan pihak ektern. Pemerintah daerah dalam hal mendorong pertumbuhan PAD cenderung mengandalkan pajak dan retribusi yang didasarkan oleh peraturan yang ditetapkan. Dalam hal ini, untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak dan retribusi sebaiknya tidak hanya mengandalkan peraturan daerah semata, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas SDM, penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung, peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, dan netralitas, revitalisasi lembaga-lembaga terkait, termasuk desentralisasi kewenangan perijinan investasi, kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik, dan optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.

1. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas pada Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 sampai 2015 menunjukkan adanya kecenderungan mengalami peningkatan. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 sampai 2015 dapat dikategorikan efektif sedangkan pada tahun 2012 belum mampu mencapai afektivitas, hal tersebut dikarenakan rata-rata rasio yang telah dicapai adalah 112,40% lebih dari 1 (satu) atau 100% (Halim, 2002:44).

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. (Halim, 2002:128).

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa untuk tahun 2012 sampai 2015 terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2015 mempunyai rata-rata rasio 380,49% dan dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa *(output)* yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya *(input)* yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain; (1) efisiensi pada sektor usaha swasta *(private sector efficiency)*, dijelaskan dengan konsep input output yaitu rasio output dan input (2) efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat *(public sector efficiency)* adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin (3) Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran *(output)* dengan biaya *(input)* yang terendah atau dengan biaya *(input)* minimal diperoleh hasil *(output)* yang diinginkan. Organisasi seektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya maka Kabupaten Manggarai Barat dalam meningkatkan efisiensi dapat dengan empat cara; (a) Menaikkan output untuk input yang sama (b) Menaikkan output lebih besar dari pada proporsi peningkatan input (c) Menurunkan input untuk output yang sama

1. Rasio Keserasian

Berdasarkan persamaan tersebut maka rasio belanja operasional pada Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2015 diperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 67,43%. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2015 sebagaian besar dana yang dimiliki diprioritaskan untuk kebutuhan belanja modal, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2015 kurang mengutamakan penyediaan sarana prasarana ekonomi bagi masyarakat, hal tersebut dikarenakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2015

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewjiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang temasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001:167):

1. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan
4. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar balanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan / kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22). Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan.

1. Rasio Pertumbuhan

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2015 menunjukkan adanya rasio pertumbuhan yang berfluktuasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan atas pencapain pertumbuhan atas pendapatan asli daerah setiap periodenya menunjukkan adanya pertumbuhan yang mengalami penurunan pada tahun 2015.

Dilihat dari rasio aktivitasnya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat masih mengutamakan belanja rutin (belanja aparatur daerah). Belanja pembangunan (belanja publik) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah mulai memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi masyarakatnya. Tidak menutup kemungkinan untuk APBD tahun yang akan datang rasio aktivitas terhadap belanja pembangunan semakin meningkat. Rasio pertumbuhan secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah masih rendah, meski setiap tahunnya rasio pertumbuhan selalu meningkat. Terlihat pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan, menunjukkan penerimaan pemerintah daerah semakin baik dan lebih banyak membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Kualitas produk berpengaruh signifikanterhadap kepuasan konsumen 2) Promosi berpengaruh signifikanterhadap kepuasan konsumen 3) Kualitas produk dan promosi berpengaruh signifikanterhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 1) Dalam upaya untuk menciptakan kepuasan konsumen diharapkan produk yang ditawarkan memiliki performa atau kinerja produk yang tinggi,. 2) Perusahaan harus memperhatikan bentuk fisik dari produk selain kualitas produk yang ditawarkan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk (misalnya menawarkan produk yang memiliki desain yang elegan, warna yang bervariasi, dan lain-lain).

**DAFTAR PUSTAKA**

Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim, 2003, **Analisis Laporan Keuangan,** Edisi Revisi, Penerbit UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

Halim, Abdul, 2002, **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah,** Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Enny, 2004, **Dasar-Dasar Manajemen Keuangan,** Cetakan Kedua, Penerbit: Akademi Manajemen dan Percetakan, Yogyakarta.

Munawir,S, 2002. **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi Keempat, Cetakan Kesebelas, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2004 Tentang **Pemerintah Daerah**

Ulum, Ihyaul, 2005, **Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar,** Cetakan Kedua, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Bojonegoro.

Warsono, 2003, **Manajemen Keuangan Instansi,** Jilid Pertama, Edisi Ketiga, Penerbit: Bayumedia Publishing.